



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHYUZAR
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 641252

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.605.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 64 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 19979 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 7.087 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 14016 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 20035 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 643.5 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, WARISAN Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 6638 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah Seluas 8354 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 14.700.000

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000



2. LAINNYA, POLYGON SPORT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
700.000
3. LAINNYA, GIANT REVEL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	170.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	66.727.487
F. HARTA LAINNYA	Rp.	30.000.000
Sub Total	Rp.	1.886.427.487
III. HUTANG	Rp.	531.901.642
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.354.525.845

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.